BADAN PUSAT STATISTIK

ST2023
SENSUS PERTANIAN

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH I TAHUN 2022

Scan Me...

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT WILAYAH I
TAHUN 2022

BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I Badan Pusat Statistik Tahun 2022. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah I kepada publik dan pemangku kepentingan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai unit pengawasan intern di Lingkungan BPS, kinerja Inspektorat Wilayah I harus dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan unit kerja lain dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPS yang dijabarkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Kontribusi yang dapat diberikan dari hasil pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Wilayah I diantaranya meningkatkan kualitas tata kelola dan efektifitas pengelolaan keuangan negara, meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi (RB).

Kami berharap Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Inspektorat Wilayah I selama tahun 2022 secara terperinci dan transparan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I. Selain itu, semoga laporan kinerja ini dapat berguna untuk evaluasi dan demi peningkatan kinerja Inspektorat Wilayah I pada khususnya.

Jakarta, 30 Januari 2023

Inspektur Wilayah I

Faizal Anwar

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Daftar Lampiran v
Ikhtisar Eksekutif vi
Bab I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 1
1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2
1.4 Tanggung Jawab dan Wewenang 2
1.5 Sumber Daya Manusia Inspektorat Wilayah I 3
1.6 Potensi dan Permasalahan 5
1.7 Sistematika Penyajian Laporan 6
Bab II Perencanaan Kinerja 7
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024 7
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I 2022 9
Bab III Akuntabilitas Kinerja 11
3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I 2022 11
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2018-2021 21
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021-2020 22
3.3 Capaian Kinerja terhadap Target Renstra 2020-2024 27
3.4 Prestasi tahun 2022 28
3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2022 29
3.6 Upaya Efisiensi Tahun 2022 30
3.7 Kegiatan Prioritas Inspektorat Wilayah I Tahun 2022 30
Bab IV Penutup 36
4.1 Simpulan Umum 36
4.2 Tindak Lanjut 36

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024.....	8
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2022.....	10
Tabel 3	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2022.....	12
Tabel 4	Nilai Pilar Penguatan Pengawasan RB Instansi Tahun 2022	20
Tabel 5	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2022…….....	23
Tabel 6	Capaian Kinerja 2022 terhadap Target Renstra 2024 …….....	27
Tabel 7	Pagu dan Realisasi Anggaran 2022 per Indikator Kinerja…….	29
Tabel 8	Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2022…….	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Wilayah I Tahun 2022 ……	3
Gambar 2	Jabatan Fungsional Pegawai Inspektorat Wilayah I..……...	4
Gambar 3	Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024 …….....……...	8
Gambar 4	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama	9
Gambar 5	Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2018-2022	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPS…….....	35
Lampiran 2	Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024 …..…….	36
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2020……	37
Lampiran 4	Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2022 per Triwulan ……	39
Lampiran 5	Daftar Satuan Kerja Inspektorat Wilayah I Yang Diaudit tahun 2022……..	40
Lampiran 6	Daftar Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Audit Tahun 2022……..	41
Lampiran 7	Daftar Satker BPS Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat Wilayah 1 Dengan Nilai SAKIP “B”.....……	42
Lampiran 8	Daftar Diklat dan Seritifikasi Inspektorat Wilayah I Tahun 2022 ……	46

IKHTISAR EKSEKUTIF

Unit kerja Inspektorat Wilayah I sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Pusat Statistik mempunyai peran meningkatkan pengendalian internal atas akuntabilitas baik keuangan maupun kinerja, serta memastikan reformasi birokrasi berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang terpercaya dan berkualitas. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah I telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Visi Inspektorat Wilayah I 2020-2024 adalah **"Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas".** Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Wilayah I mempunyai tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis yaitu meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan dua sasaran strategis. Sasaran strategis pertama, meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS . Sasaran strategis kedua, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Inspektorat Wilayah I memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang diturunkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Wilayah I yang selaras dengan IKU Inspektorat Utama BPS. Jumlah IKU sesuai dengan Peraturan Kepala BPS nomor 3 tahun 2022, dimana terdapat lima indikator yang digunakan, hal ini berbeda dengan IKU pada tahun 2021 yang menggunakan sembilan indikator. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Strategis Inspektorat Wilayah I tahun 2020-2024 yang telah dilakukan reviu di tahun 2022 ini.

Dari sisi anggaran pada tahun 2022 terdapat satu komponen yang dikelola oleh Inspektorat Wilayah I yaitu pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Inspektorat I mempunyai pagu awal sebesar Rp1.325.979.000,-, dan pagu setelah dilakukan penyesuaian menjadi Rp869.329.000,- dengan realisasi sebesar Rp861.700.782,- (99,12 %). Pengurangan anggaran berdampak secara signifikan terhadap kualitas capaian kinerja Inspektorat Wilayah I, dan mendorong dilakukannya penyesuaian mekanisme kegiatan pengawasan rutin.

Pencapaian atas sasaran strategis, IKU dan IKS tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik. Dari dua sasaran strategis dan lima IKU yang menjadi Penetapan Kinerja Inspektur Wilayah I tahun 2022, sebanyak 4 (empat) IKU terealisasi diatas target. Sementara itu terdapat satu IKU yang tidak tercapai pencapaiannya yaitu "Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I". Terjadi penurunan capaian total dibanding tahun 2021 yang lalu meskipun terdapat perbedaan pada jumlah IKU yang digunakan yakni sebelumnya terdapat sembilan indikator. Secara rinci realisasi masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian IKU Inspektorat Wilayah I Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	96,30	96,30	100
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI	80,11	80,52	100,51
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	97,18	79,19	81,49
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	81,03	85,63	105,68
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I	83,15	85,70	103,07
Rata-Rata Capaian Kinerja				**98,15**

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah I pada tahun 2022 memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 98,15 persen, menurun dibandingkan capaian tahun 2021 lalu sebesar 106,74 persen. Analisis dan evaluasi atas pencapaian tujuan/sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2022 dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2022 ini. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja Inspektorat Wilayah I pada tahun 2022 dan selanjutnya dapat digunakan dalam membuat rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I di masa mendatang.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas Inspektorat Wilayah I sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik adalah melaksanakan pengawasan fungsional, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Tugas fungsional Inspektorat Wilayah I dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2022 yang diselaraskan dengan Renstra 2020-2024 reviu terbaru di tahun 2022.

Setiap awal tahun, Inspektorat Wilayah I menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I tahun 2022. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring setiap triwulanan dalam bentuk matrik rencana aksi dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja berkala (laporan capaian kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporkan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022 adalah sebagai pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Wilayah I kepada Inspektur Utama dan Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka

mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk memberikan gambaran, analisa, dan evaluasi atas capaian kinerja tujuan dan sasaran, yang dituangkan dalam indikator-indikator kinerja selama tahun 2022.

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Kedudukan Inspektorat Wilayah I dalam struktur organisasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik, adalah sebagai unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektorat Utama dan Kepala BPS. Inspektorat Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur dengan jabatan Eselon II.

Tugas Inspektorat Wilayah I seperti tercantum pada BAB X Bagian ketiga Pasal 101 adalah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat serta sebagian unit kerja BPS di Pusat.

Fungsi Inspektorat Wilayah I sebagaimana tercantum pada BAB X Bagian ketiga dalam pasal 102 yaitu:

a. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di Wilayah I;
b. Pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di Wilayah I

1.4 Tanggung Jawab dan Wewenang

Sesuai dengan pembagian area pengawasan yang tertuang dalam Surat Perintah Inspektur Utama tahun 2022, Inspektorat Wilayah I bertanggungjawab menjadi koordinator dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Utama antara lain :

1. Audit Kinerja Sensus dan Survei;
2. Audit Tata Kelola TI;
3. Pembinaan dan evaluasi SAKIP;
4. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB);
5. Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Reviu PBJ (perencanaan, pemilihan, pelaksanaan, serah terima)

Disamping itu sesuai dengan wewenang dalam tugas pengawasan sebagai unit organisasi yang melakukan kegiatan penjaminan kualitas (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*), Inspektorat Wilayah I secara rutin melakukan kegiatan yang terdiri dari:

1. Audit Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi (Kinerja);

3. Reviu Laporan Keuangan;
4. Reviu Laporan Kinerja Instansi;
5. Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa (PB/J);
6. Reviu dokumen pengadaan barang/jasa sesuai tahapan;
7. Reviu dokumen kerjasama dengan pihak/instansi lain;
8. Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern (SPI On-Line);
9. Pemantauan/Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
10. *Liasion Officer* (LO) Pemeriksaan BPK;
11. Reformasi Birokrasi Instansi pilar pengawasan sub pilar gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan;
12. Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama;
13. Kegiatan konsultasi bidang pengawasan dengan Satker mitra sesuai yang tertuang dalam Program Auditor Mitra Satker (AMS).

1.5 Sumber Daya Manusia Inspektorat Wilayah I

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Wilayah I BPS pada tahun 2022 berjumlah 35 orang. Komposisi pegawai di Inspektorat Wilayah I baik dilihat dari jenjang pendidikan maupun jabatan fungsionanya sebagai berikut :

a. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

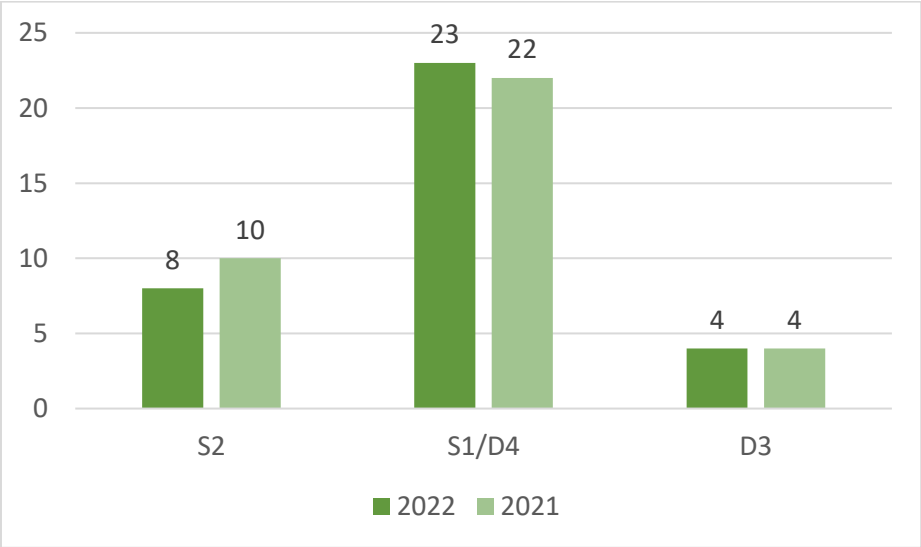

Gambar 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Wilayah I Tahun 2022

Pada tahun 2022 terdapat penambahan pegawai satu orang CPNS berlatar S1 Akuntansi. Sementara itu terdapat pula mutasi pegawai keluar sebanyak 2 orang dibandingkan kondisi tahun 2021. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan formal SDM Inspektorat Wilayah I sudah sangat baik.

b. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsional Auditor

Di lingkungan Inspektorat Wilayah I terdapat 17 pegawai yang telah menjabat sebagai Fungsional Tertentu atau Fungsional Auditor, 17 pegawai sebagai Staf/Fungsional Umum, dan sisanya 1 pegawai sebagai Pejabat Struktural Inspektur. Untuk jabatan Fungsional Auditor, dibagi kedalam beberapa jenjang jabatan yaitu auditor pelaksana lanjutan, auditor pertama, auditor muda dan auditor madya. Banyaknya pegawai yang masih menjadi staf disebabkan proses menuju jabatan fungsional auditor setidaknya harus bertugas minimal 2 tahun di inspektorat, serta pengajuan melalui persetujuan formasi dari BPKP membutuhkan waktu yang lebih lama. Penambahan pegawai melalui penerimaan CPNS formasi auditor dan tambahan lulusan Diploma III STAN merupakan langkah mempertahankan komposisi sumber daya manusia di Inspektorat Wilayah I.

Komposisi pegawai Inspektorat Wilayah I menurut jenjang Jabatan Fungsional Auditor dirinci pada grafik di bawah ini:

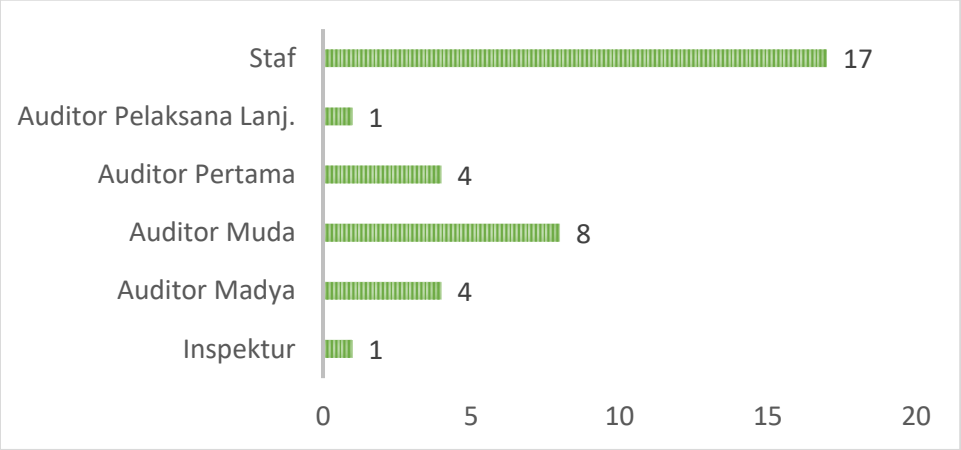

Gambar 2. Jabatan Fungsional Pegawai Inspektorat Wilayah I

c. Kompetensi Pegawai

Peningkatan kompetensi SDM merupakan upaya agar kegiatan pengawasan di Inspektorat Wilayah I dapat dilakukan sesuai standar dan metode yang tepat. Melalui kegiatan Diklat pembentukan auditor bagi 1 pegawai yang baru akan mendapatkan sertifikat sebagai prasayarat untuk masuk ke dalam tim pemeriksa Inspektorat Wilayah I. Disamping itu seluruh pegawai mendapat kesempatan untuk mengikuti Diklat teknis

substantif di bidang pengawasan, kegiatan sertifikasi audit (4 orang), dan peningkatan kompetensi teknis lainnya. Peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Inspektorat Wilayah I tentunya didukung anggaran yang memadai, keikutsertaan dalam Diklat menyesuaikan kalender dari BPKP serta penawaran atau undangan dari penyedia Diklat lain.

1.6 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh Inspektorat Wilayah I sebagai berikut:

1. Inspektorat Wilayah I secara kelembagaan langsung di bawah Inspektorat Utama BPS dan telah diberikan pembagian penugasan melalui Surat Perintah Inspektur Utama tahun 2022;
2. Inspektorat Wilayah I telah memiliki Piagam Audit (*Audit Charter*), Standar Audit dan Kode Etik Auditor dalam pelaksanaan pengawasan internal;
3. Telah memiliki berbagai SOP dan Pedoman Pengawasan walaupun perlu dilakukan reviu secara berkala;
4. Inspektorat Utama sendiri telah memiliki berbagai layanan penunjang seperti Layanan Pengaduan secara online/*Whistle Blowing System (WBS),* web SPI Online, penggunaan aplikasi Surat Tugas Monita, layanan Halo Inspektorat, dan Tim Auditor Mitra Satker (AMS);
5. Inspektorat Wilayah I dipercaya untuk menjadi koordinator dalam probity audit pengadaan barang jasa, evaluasi implemntasi SAKIP, serta mengawal pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di BPS, khususnya pada Pilar Penguatan Pengawasan sub pilar gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan;
6. Secara berkala melakukan pendampingan kepada Satker atau unit kerja pusat dalam pengadaan barang jasa, evaluasi SAKIP, maupun pemeriksaan BPK ;
7. Telah memiliki sumber daya auditor madya sebanyak 4 orang dan auditor muda sebanyak 8 orang, dan dibantu oleh auditor pertama kebawah sebanyak 23 orang.

Permasalahan yang berkaitan dengan Inspektorat Utama dan Inspektorat Wilayah I dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Kebijakan pengurangan *(auto adjusment)* anggaran mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan audit secara keseluruhan sehingga turut berdampak pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3. Adanya kegiatan prioritas pendataan awal Regsosek tahun 2022 yang dibebankan kepada BPS menyebabkan fokus seluruh sumber daya dilakukan dalam rangka menyukseskan kegiatan tersebut secara teknis maupun administrasi, sehingga dapat mengganggu perencanaan awal;
4. Pelaksanaan evaluasi SAKIP terhadap 517 satuan kerja membutuhkan upaya dan waktu yang lama. Terdapat potensi perbedaan persepsi antar evaluator serta pemahaman yang tidak lengkap dari satker yang dievaluasi;
5. Tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat serta pemeriksaan eksternal belum menjadi perhatian utama dan belum efektif untuk menjadi bahan pengambilan keputusan.

1.7 Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di Inspektorat Wilayah I, potensi dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah I; serta sistematika penyajian laporan;

BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah I 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I Tahun 2022;

BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2022, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama, Capaian Kinerja Inspektorat Utama terhadap Target Renstra 2020-2024 dan Realisasi Anggaran tahun 2022;

BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi simpulan umum dan upaya tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya;

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah I sebagai bagian dari Inspektorat Utama BPS telah menetapkan pedoman kerja seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024. Di dalam Renstra menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok selama periode lima tahunan. Pada tahun 2022 ini merupakan periode ketiga dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024.

Visi Inspektorat Utama adalah "Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas". Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Utama menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. *Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi*;

   "Inspektorat Utama terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*risk based audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggaraan statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E)".

2. *Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan;*

   "Inspektorat Utama berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan intern, meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel".

3. *Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP;*

   "Inspektorat Utama sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), assessment JFA, kursus, seminar, workshop, study banding, dan pelatihan di kantor

sendiri (PKS)/sharing knowledge. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya".

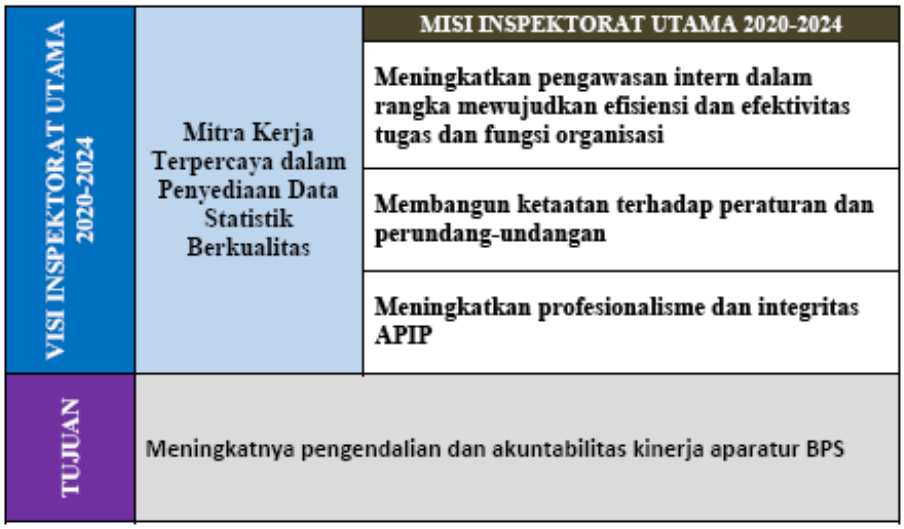

Gambar 3. Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Utama 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai yang memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	SS.1 Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	SS.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

Tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada gambar berikut.

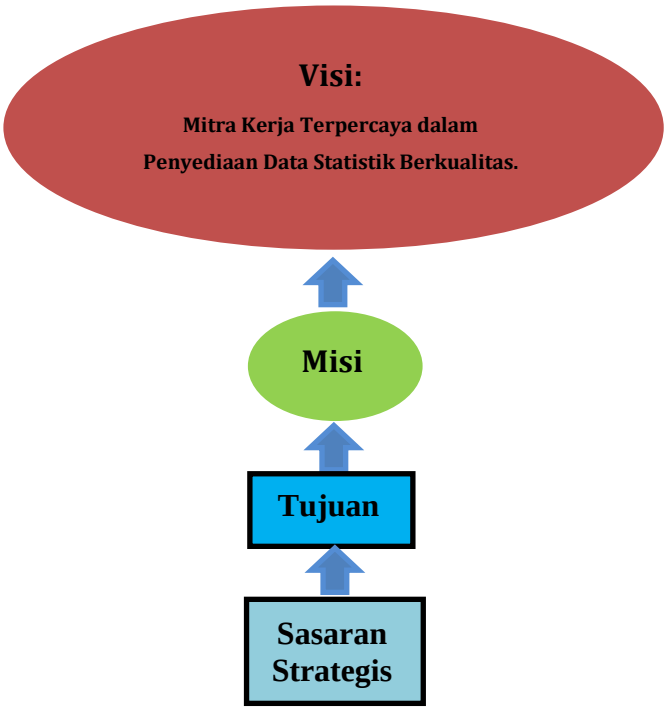

Gambar 4. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama

Inspektorat Wilayah I merupakan bagian dari Inspektorat Utama. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024 melekat pada Renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024. Sehingga visi,misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah I sama dengan visi,misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Utama.

Pada tahun 2022 Inspektorat Wilayah I melakukan reviu atas Renstra 2020-2024 sejalan dengan Peraturan Kepala BPS nomor 3 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama, dan dengan tujuan meningkatkan akurasi pengukuran target yang ditetapkan dengan melihat kemampuan sumberdaya serta tingkat pencapaian target pada tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran target kinerja dilakukan sebagai bagian akuntabilitas kinerja dan tetap mempertahankan target jangka menengah yang ditetapkan sebelumnya. Lebih rinci, target jangka menengah pada Renstra 2020-2024 reviu ditampilkan pada Lampiran 2.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I Tahun 2022

Pada awal tahun, ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS			
Sasaran Strategis : Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,30
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	97,18
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Persen	81,03
Sasaran Strategis : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I (%)	Persen	83,15

Perjanjian Kinerja tahun 2022 merupakan komitmen untuk mencapai sasaran dan tujuan seperti yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 yang sekaligus target kinerja jangka menengah. Keberhasilan pencapaian target-target tersebut menjadi tolak ukur kinerja Inspektorat Wilayah I dan memberi kontribusi signifikan pada kinerja Inspektorat Utama.

Realisasi target perjanjian kinerja dimonitoring setiap triwulanan yang dituangkan dalam form rencana aksi (FRA). Hasil monitoring tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan capaian kinerja triwulanan. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target dalam PK menjadi tanggung jawab Inspektur Wilayah I kepada Inspektur Utama atas penggunaan anggaran Inspektorat Wilayah I.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2022

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2022 merupakan pencapaian dari indikator-indikator sasaran strategis selama tahun 2022. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Reviu Terakhir). Ulasan capaian kinerja Inspektorat Wilayah I adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Inspektorat Wilayah I mempunyai satu tujuan dan dua sasaran strategis. Tujuannya yaitu “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS”. Sedangkan sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS” serta “Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah:

Tabel 3. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,30	96,30	100
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11	80,52	100,51
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	97,18	79,19	81,49
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Persen	81,03	85,63	105,68
Rata-rata Capaian Sasaran 1				96,92

Sasaran 2: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I	Persen	83,15	85,70	103,07
Rata-rata Capaian Sasaran 2				103,07
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran				**98,15**

Berdasarkan tabel diatas, capaian sasaran 1 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS baru tercapai 96,92 persen, sedangkan pada sasaran 2 Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel telah mencapai 103,07 persen. Dari lima Indikator Kinerja Sasaran (IKS), terdapat empat IKS yang realisasinya telah mencapai target yang ditetapkan. Terdapat satu indikator yang tidak memenuhi target yaitu pada IKS tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I. Dari rata-rata nilai capaian kedua sasaran strategis tersebut menunjukkan capaian tujuan dari Inspektorat Wilayah I yakni meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS yang mencapai angka 98,15 persen. Angka tersebut tergolong baik meskipun terdapat indikator dan sasaran strategis yang belum mencapai target. Selanjutnya akan dijabarkan capaian kinerja dari masing-masing sasaran beserta indikator kinerja pada setiap sasaran strategis.

Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Untuk sasaran strategis ke-satu, diukur dengan rata-rata capaian empat IKS, dan didapatkan capaian kinerja sasaran sebesar 96,92 persen. Dengan demikian nilai capaian kinerja pada sasaran strategis ini belum dapat dikatakan berhasil, dikarenakan masih kurangnya tingkat capaian kinerja pada IKS penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I. Perlu dilakukan upaya perbaikan dalam perencanaan kegiatan audit termasuk pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit agar dapat mencapai target. Secara rinci analisis dan evaluasi atas masing-masing indikator sasaran dijelaskan dibawah ini.

IKS 1.1 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)	Persen	96,30	96,30	100

Tingkat keberhasilan : Target indikator ini pada tahun 2022, adalah 96,30 persen, sementara realisasinya sebesar 100 persen atau telah seluruh Satuan Kerja yang diperikasa tidak ditemukan penyimpangan kerugian negara. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja pada IKS ini telah berhasil mencapai target. Capaian diatas menunjukkan bahwa kegiatan *assurance* atau penjaminan mutu melalui audit pengelolaan keuangan negara telah berdampak pada minimnya tingkat kerugian negara yang ditemukan oleh tim auditor Inspektorat Wilayah I.

Analisis dan Evaluasi : Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah satuan/unit kerja yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA dibagi dengan jumlah seluruh Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang diaudit dikalikan dengan 100 persen. Sepanjang tahun 2022 telah dilakukan 26 penugasan audit untuk satuan kerja BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dari total target yang diaudit 27 Satker. Realisasi sebesar 96,30 (realisasi 26 dari target 27 Satker) berarti terdapat satu Satker yang tidak diaudit berdasarkan rencana awal yakni BPS Kabupaten Muna, hal ini disebabkan terbatasnya waktu dan sumber daya, dan jarak ke Satker cukup jauh. Keberhasilan kinerja pada IKS ini mendukung sasaran agar satuan kerja memahami pengendalian internal dalam tata kelola keuangan negara sehingga mendukung penggunaan keuangan sesuai aturan yang berlaku.

Kondisi pada tahun 2022 secara umum menunjukkan bahwa sampai triwulan III, Inspektorat Wilayah I hanya dapat melakukan audit pada empat Satker saja dari total 27 yang ditargetkan, hal ini dikarenakan anggaran audit kinerja telah terserap sebagian besar (94,49%). Hal ini menyebabkan beban target di triwulan IV menjadi cukup banyak yakni harus melakukan audit pada 23 Satker.

Kendala-kendala yang dihadapi adalah :

1. Anggaran yang terbatas dan berkurang siginifikan akibat *auto adjustment* dari semula Rp1.325.979.000,-, menjadi Rp869.329.000,- sehingga terbatas dalam melakukan *field audit*

2. Pada bulan Oktober 2022, BPS secara institusi mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek 2022) yang membutuhkan sumber daya baik waktu maupun anggaran yang terfokus kepada kegiatan prioritas tersebut. Hal ini berdampak pada penjadwalan audit yang harus tertunda akibat kesibukan baik para auditor maupun Satker demi menyukseskan kegiatan Regsosek 2022.

Atas kendala diatas, Inspektorat Wilayah I dilakukan upaya sebagai solusi mengatasi permasalahan antara lain :

1. Usaha untuk melakukan penambahan anggaran *field audit* yang diajukan kepada Biro Perencanaan;
2. Dengan tidak adanya opsi melakukan filed audit, maka Inspektorat Wilayah I melakukan *desk/remote* audit dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Oktober dan Desember tahun 2022. Meskipun kegiatan *desk* dirasa belum memberikan keyakinan yang memadai, namun tetap dapat memberi dampak atas pengelolaan keuangan negara yang lebih baik untuk Satker.

IKS 1.2 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11	80,52	100,51

Tingkat keberhasilan : Pada tahun 2022, Target kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebesar 80,11 persen sementara realisasinya melebihi target yakni sebesar 80,52 persen. Hal ini menunjukkan upaya meningkatkan jumlah penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI oleh Satker/unit kerja telah berhasil sesuai target tahunan.

Analisis dan Evaluasi : Realisasi atas indikator ini diukur berdasarkan dokumen pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI kondisi sampai semester I tahun 2022, dimana terdapat total 587 rekomendasi yang selesai dari total 729 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dengan demikian nilai realisasinya 80,52 persen.

Namun demikian data tersebut juga memberi gambaran masih cukup banyak rekomendasi yang perlu diupayakan penyelesaiannya di tahun-tahun mendatang.

Setiap tahun BPK selaku pemeriksa eksternal pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap BPS, dan memberikan rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh satuan/unit kerja yang bersangkutan. Sebagai mitra dari unit organisasi pusat yakni Kedeputian Metodologi dan Informasi Stastik, Kedeputian Distribusi dan Jasa, serta Politeknik STIS, dan Satuan Kerja BPS di 11 Provinsi seluruh Indonesia, Inspektorat Wilayah I berupaya meonitoring setiap rekomendasi BPK yang terkait unit-unit kerja tersebut

Dalam aktivitas untuk pencapaian kinerja indikator ini, masih terdapat kendala-kendala yakni : proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK hingga tahun 2022 masih dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II BPS sebagai koordinator, sehingga perlu koordinasi secara kontinyu agar informasi dan langkah-langkah penyelesaian dapat dimaksimalkan saat melakukan monitoring terhadap satuan/unit kerja yang terkait;

Oleh karena itu telah dilakukan upaya atau solusi agar target indikator kinerja tahun 2022 dapat tercapai antara lain adalah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Wilayah II sebagai koordinator, serta komunikasi dengan satuan kerja/unit kerja terkait dengan rekomendasi temuan BPK seperti dari kedeputian distribusi dan jasa, serta kedeputian MIS. Hal ini sebagai pemantauan dan mengingatkan kepada satuan/unit kerja untuk segera melakukan tindak lanjut.

IKS 1.3 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	97,18	79,19	81,49

Tingkat keberhasilan : Pada tahun 2022, capaian kinerja indikator tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti baru mencapai 79,19 persen dari seluruh rekomendasi audit inspektorat wilayah I yang harus diselesaikan. Dengan capaian kinerja 81,49 persen menunjukkan atas indikator penyeleaian rekomendasi audit Inspektorat

Wilayah I di tahun 2022 belum berhasil dicapai sesuai target. Sebab ketidakberhasilan adalah permasalahan jadwal audit yang baru dilakukan di akhir tahun 2022 seperti yang telah disampaikan pada pembahasan IKS 1.1 sebelumnya mengakibatkan waktu penyelesaian tindak lanjut menjadi sangat singkat.

Analisis dan Evaluasi : Indikator kinerja sasaran ketiga dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah tindak lanjut rekomendasi atas audit pengelolaan keuangan yang sesuai dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi. Pada tahun 2022 dari total target 27 kegiatan audit telah terlaksana 26 kegiatan audit yang mengeluarkan 322 rekomendasi, dan baru dapat terselesaikan sebanyak 255 atau 79,19 persen. Rekomendasi Inspektorat merupakan upaya untuk meminimalkan kondisi yang tidak sesuai dengan aturan, kelemahan dalam pengendalian internal, serta meningkatkan *value for money* atas penggunaan keuangan negara. Satuan kerja yang diaudit perlu waktu untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi, namun akibat waktu audit baru dilaksanakan di bulan Oktober serta akhir tahun yakni bulan Desember sehingga sampai periode penilaian kinerja tahun 2022 selesai, tingkat penyelesaian tindak lanjut belum dapat mencapai target.

Atas kondisi diatas dapat disampaikan kendala yang dihadapi antara lain adalah Satker terlambat atau belum sepenuhnya mengirimkan dokumen tindak lanjut hasil audit ke Inspektorat Wilayah I akibat jadwal audit yang dilakukan akhir tahun sehingga waktu tindak lanjut menjadi singkat, ditambah kesibukan Satker itu sendiri menyelesaikan kegiatan prioritas Regsosek tahun 2022.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Wilayah I telah melakukan beberapa upaya atau solusi agar target indikator kinerja tahun 2022 dapat tercapai semaksmal mungkin, yaitu : melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut dari Satker melalui pelaksanakan monitoring penyelesaian rekomendasi audit, dan melanjutkan pemantauan di tahun 2023. Meskipun telah dilakukan upaya diatas, namun terbatasnya waktu menyebabkan tingkat penyelesaian masih belum dapat mencapai target. Hal ini menjadi catatan tersendir agar penjadwalan audit sebisa mungkin tidak dilakukan di akhir tahun sehingga tingkat penyelesaian tindak lanjutnya mempunyai waktu yang cukup.

IKS 1.4 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	81,03	85,63	105,68

Tingkat keberhasilan : Pada tahun 2022, Persentase Satuan/Unit Kerja dibawah Inspektorat Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) ditargetkan sebesar 81,03 persen atau sebanyak 141 satuan dan unit kerja, dengan realisasinya sebesar 85,63 atau sebanyak 149 satuan kerja. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja sebesar 105,68 persen atau berhasil melebihi target tahunan yang telah ditetapkan.

Analisis dan Evaluasi : Indikator kinerja sasaran ini diukur dengan menghitung jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B dibagi dengan jumlah Satker/Unit Kerja di Wilayah I. Dari total 174 Satker/Unit Kerja yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Wilayah I, sebanyak 149 diantaranya telah memperoleh nilai B untuk implementasi SAKIP di tahun 2022. Daftar Satker yang telah mendapat nilai B dapat dilihat pada Lampiran. Keberhasilan mencapai target yang ditetapkan tidak lepas dari upaya untuk memberikan pemahaman serta pembinaan yang tepat kepada unit yang mengimplementasikan SAKIP. Sejak awal tahun 2022 Inspektorat Wilayah I sebagai koordinator dalam evaluasi implementasi SAKIP Inspektorat Utama, telah menjalankan program asistensi untuk penyusunan Laporan Kinerja sebagai upaya dalam meminimalkan kesalahan dalam pelaporan kinerja. Tim evaluator SAKIP juga telah memaksimalkan penggunaan *dashboard* web terintegrasi dalam evaluasi untuk memudahkan evaluator dan satuan/unit kerja mememuhi dokumen untuk evaluasi. Upaya diatas telah mendapat respon baik dari satuan kerja daerah, terbukti dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi evaluasi SAKIP, hampir sebagian besar berperan aktif dan ikut memperkuat implementasi SAKIP di satuan kerja masing-masing.

Untuk mencapai kinerja tersebut, sepanjang pelaksanaan evaluasi masih ditemukan beberapa kendala yaitu:

1. Kurangnya pemahaman satuan/unit kerja tentang dokumen-dokumen yang diminta oleh tim evaluator dari inspektorat;
2. Kurangnya pemahaman satuan/unit kerja mengenai konsep SAKIP dan alur evaluasi oleh Inspektorat;

3. Banyak satuan/unit kerja yang masih mendapatkan nilai di bawah B pada saat *desk* evaluasi awal sehingga perlu penanganan lebih lanjut;
4. Banyaknya satuan/unit kerja yang tidak tepat memberikan dokumen tindak lanjut;
5. Masih ditemui perbedaan persepsi antar tim evaluator dalam memberikan penilaian akhir;

Upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai solusi mengatasi kendala tersebut antara lain :

1. Melaksanakan *Workshop* implementasi SAKIP untuk satuan kerja BPS seluruh Indonesia di awal tahun sebagai wahana untuk menjelaskan dokumen SAKIP yang baik;
2. Membangun forum tanya jawab (QnA) pada *dashboard* evaluasi SAKIP dan adanya contoh format dokumen SAKIP yang dapat dipedomani;
3. Membuat instrumen untuk tindak lanjut atas hasil evaluasi sementara beserta petunjuk pelaksanakan serta dilakukan tindak lanjut ke lapangan *(field evaluation)* dari tim inspektorat.
4. Memperpanjang waktu tindak lanjut atas hasil evaluasi ke Satker;
5. Dilakukan panelisasi secara berkala dan menyusun nota dinas Inspektur Wilayah I terkait kebijakan panelisasi dan penilaian akhir sebagai pedoman bersama untuk mengurangi perbedaan persepsi;

Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

IKS 2.1 : Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen	83,15	85,70	103,07

Tingkat keberhasilan : Keberhasilan pencapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPS tercermin dari peningkatan nilai RB pada setiap pilarnya. Inspektorat Wilayah I berperan dalam peningkatan nilai RB instansi BPS pada pilar penguatan pengawasan, khususnya sub pilar Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan. Target persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada sub Pilar Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan (COI) untuk tahun 2022 adalah sebesar 83,15 persen dengan realisasi sebesar 85,70 persen. Dengan capaian kinerja sebesar 103,07 persen dapat dikatakan upaya peningkatkan implementasi RB pada pilar pengawasan telah berhasil sesuai target tahunan.

Analisis dan Evaluasi : Indikator kinerja sasaran ini diukur berdasarkan nilai pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai Internal (TPI) pelaksanaan RB Instansi. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa nilai RB pada pilar pengawasan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama secara keseluruhan dan nilai untuk sub pilar Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan telah mencapai nilai maksimal berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI).

Tabel 4. Nilai Pilar Penguatan Pengawasan RB Instansi Tahun 2022

URAIAN				BOBOT	TARGET 2022	Realisasi 2022
PEMENUHAN				**20**	**20**	**20**
7	**PENGUATAN PENGAWASAN**			**2,5**	**2,41**	**2,45**
	i.	**Gratifikasi**		0,3	0,23	0,3
	ii.	**Penerapan SPIP**		0,3	0,3	0,25
	iii.	**Pengaduan Masyarakat**		0,5	0,5	0,5
	iv.	***Whistle Blowing System***		0,3	0,3	0,3
	v.	**Penanganan Benturan Kepentingan**		0,3	0,28	0,3
	vi.	**Pembangunan Zona Integritas**		0,5	0,5	0,5
	vii.	**Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**		0,3	0,3	0,3
HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN				**10**	**10**	**10**
7	**PENGUATAN PENGAWASAN**			**2**	**1,2**	**1,12**
	ix.	**Kapabilitas APIP**		1	0,6	0,56
		-	Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)	1	0,6	0,56
	x.	**Maturitas SPIP**		1	0,6	0,56
		-	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP)	1	0,6	0,56
REFORM (30)				**30**	**30**	**30**
7	**PENGUATAN PENGAWASAN**			**3,75**	**3,25**	**3,5**
	i.	**Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)**		0,75	0,75	0,75
	ii.	**Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)**		0,6	0,6	0,6
	iii.	**Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)**		0,6	0,4	0,6
	iv.	**Penanganan Pengaduan Masyarakat**		0,6	0,5	0,6
	v.	**Pembangunan Zona Integritas (ZI)**		0,6	0,5	0,42
	vi.	**Peran APIP**		0,6	0,5	0,53
Total				8,25	6,86	7,07
Persentase				**100,00%**	**83,15%**	**85,70%**

Namun untuk pengukuran capaian kinerja telah disepakati oleh seluruh Inspektorat Wilayah bahwa angka yang digunakan merupakan angka capaian total mengingat pelaksanaan RB pilar peguatan pengawasan dilakukan oleh semua unit kerja inspektorat dan saling melengkapi. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas nilai target yang ditetapkan adalah 83,15 persen dengan realisasi sebesar 85,70 persen.

Upaya yang telah dilakukan mendukung keberhasilan capaian indikator ini dalah dengan tetap melaksanakan pemenuhan dokumen pelaksanaan RB secara rutin, penyusunan tim

penanggungjawab internal inspektorat utama, secara berkoordinasi dengan tim RB instansi utama secara kontinyu.

Dalam upaya tersebut masih ditemui kendala yang menjadi perhatian pada pilar pengawasan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Wilayah I antara lain : Pemenuhan bukti dukung RB masih belum maksimal, terutama untuk sub pilar gratifikasi sedang memperbaiki Peraturan Badan, sedangkan untuk sosialisasi subpilar penanganan benturan kepentingan belum dapat dilakukan karena kesulitan narasumber dan waktu pelaksanakan.

Untuk mengatasi kendala diatas solusi yang dilakukan yaitu memaksimalkan sosialisasi RB terutama untuk sub pilar gratifikasi dengan narasumber yang terpercaya, serta mendorong percepatan penyusunan peraturan badan tentang pengendalian gratifikasi.

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2022 dengan Periode 2018-2021

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja periode empat tahun sebelumnya yakni dari tahun 2018 sampai 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 5. Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2018 - 2022

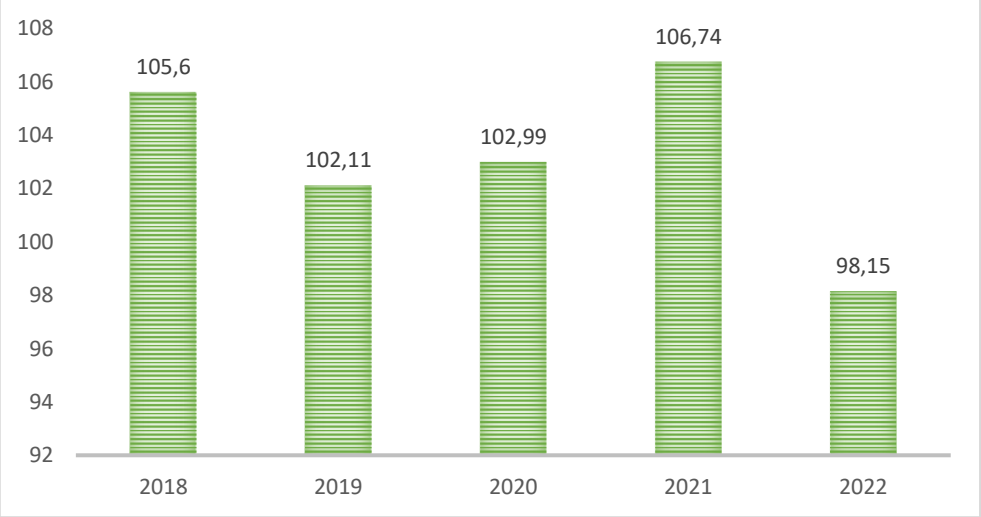

Grafik diatas memperlihatkan dinamika pencapaian kinerja dari tahun 2018 hingga 2022, dimana capaian tahun 2022 menjadi yang terendah. Faktor anggaran dan penjadwalan kegiatan audit menjadi faktor utama penghambat tercapainya seluruh indikator kinerja sasaran. Meskipun terjadi perubahan indikator kinerja dari periode Renstra 2015-2019 ke periode Renstra 2020-2024, namun perlu diperhatikan bahwa capaian total dari tahun ke

tahun selalu diatas 100 persen. Kegagalan di tahun 2022 seharusnya dapat menjadi pembelajaran untuk pmpinan dan seluruh jajaran Inspektorar Wilayah I

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Periode 2020 dan 2021

Tujuan Inspektorat Wilayah I adalah Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS. Untuk mencapai tujuan tersebut, Inspektorat Utama harus mencapai sasaran strategis, yaitu: “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS” serta “Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”. Pada tahun 2022 merupakan periode ketiga dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Oleh karena itu akan dilihat perkembangan capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020. Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 merupakan yang terendah daripada dua tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel 5 dibawah, capaian yang berkontribusi menurunkan kinerja di tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya adalah rendahnya capaian indikator kinerja tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I yang turun jauh dibandingkan sebelumnya. Disamping itu terjadi perubahan metode pengukuran realisasi capaian kinerja di tahun 2022 ini dibandingkan dua tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja berdampak pada tingkat keterbandingkan antar indikator. Penjelasan secara rinci untuk perbandingan masing-masing indikator akan dijelaskan lebih lanjut.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah I Tahun 2020 – 2022

IKS	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS										
Sasaran: Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS										
IKS 1.1	Persen	95	100	105,26	96	100	104,17	96,30	96,30	100
IKS 1.2	Persen	75	68	90,67	75	80,31	107,08	80,11	80,52	100,51
IKS 1.3	Persen	95	90	94,74	94	97,16	103,36	97,18	79,19	81,49
IKS 1.4	Persen	75	68	90,99	75	79,75	106,34	81,03	85,63	105,68
Sasaran: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel										
IKS 2.1	Persen	75	100	120	95	100	105,26	83,15	85,70	103,07
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				**102,99**			**106,74**			**98,15**

Tabel diatas menunjukkan perbandingan capaian kinerja indikator kinerja sasaran hanya pada lima indikator utama sesuai Perka BPS nomor 3 tahun 2022. Sebelumnya, terdapat sembilan indikator yang digunakan. Terdapat empat indikator yang tidak lagi diukur sebagai IKS pada tahun 2022 ini antara lain :

1. Persentase Satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah I yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBK;
3. Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah I yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBBM;
4. Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya

Keempat indikator tersebut pada tahun 2020 dan 2021 merupakan indikator kinerja sasaran strategis. Adapun rincian capaian Indikator Sasaran tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

IKS 1.1 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)

IKS	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IKS 1.1	Persen	95	100	105,26	96	100	104,17	96,3	96,3	100

Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, maka capaian indikator “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)” memperlihatkan keberhasilan mencapai target, meski lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa faktor anggaran dan strategi penjadawalan audit yang terganggu akibat adanya kegiatan prioritas yang tiba-tiba terjadi, menyebabkan capaian di tahun 2022 tidak mencakup seluruh target Satker yang harus diaudit. Disamping itu terdapat perubahan metode pengukuran, yakni dengan menetapkan target jumlah Satker terlebih dahulu yaitu 27 Satker, sedangkan realisasinya hanya mampu 26 Satker, hal ini

menyebabkan realisas di tahun 2022 hanya 96,3 persen sedangkan pada dua periode sebelumnya, tidak melihat target jumlah Satker, melainkan mengukur semua Satker yang diaudit sehingga keduanya tercapai 100 persen. Meski demikian realisasi dari indikator ini dalam tiga tahun terakhir minimal telah 100% dari satuan/unit kerja BPS yang diaudit tidak memiliki kerugian negara diatas 3% dari realisasi DIPA. Hal ini menggambarkan proses penjaminan atas aktivitas pengelolaan keuangan negara baik melalui kegiatan audit ataupun reviu tetap terjaga dengan baik dari tahun ke tahun.

Kedepan Inspektorat Wilayah I diharapkan merancang penjadwalan lebih awal dengan mempertimbangkan kegiatan prioritas ditahun 2023 seperti Sensus Pertanian 2023 yang berpotensi menggangu jadwal audit. Disamping itu ketersediaan anggaran juga menjadi perhatian tersendiri. Upaya penambahan anggaran tidak selalu sesuai dengan harapan, pelaksanakan remote audit juga masih perlu disempurnakan. Atas target jumlah Saker yang diaudit juga harus diperhatikan supaya dapat mengatur strategi pelaksanakan audit.

IKS 1.2 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

IKS	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IKS 1.2	Persen	75	68	90,67	75	81,32	108,43	80,11	80,52	100,51

Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, maka capaian indikator “Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI” lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Jika dilihat dari target yang ditetapkan maka pada tahun 2022 memasang target peningkatan yang signifikan dibanding dua tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan monitoring tindak lanjut atas pemeriksaan BPK yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama secara keseluruhan telah dilakukan lebih intensif dengan melibatkan satuan kerja yang terkait dengan temuan BPK. Perlu dicatat pula, bahwa setiap tahunnya jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK akan terus bertambah seiring pemeriksaan rutin baik dalam rangka opini laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Inspektorat utama sendiri telah merancang estimasi persentase jumlah temuan yang harus diselesaikan sebagai dasar hitung target inspektorat wilayah, dan menjadi motivasi tersendiri untuk memaksimalkan penyelesaian tindak lanjut ini.

IKS 1.3 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I

IKS	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IKS 1.3	Persen	95	90	94,74	94	97,16	103,36	97,18	79,19	81,49

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian indikator "Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I" jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Meskipun pada Tahun 2020, pencapaian kinerjanya 94,74 persen atau juga tidak mencapai target. Pemberian target sebenarnya telah mempertimbagkan tingkat capaian pada tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 memperimbangkan penurunan target, sementara target tahun 2022 ditetapkan kurang lebih sama dengan capaian tahun 2021. Sebagai bagian dari pemantauan hasil pengawasan, Inspektorat Wilayah I selalu ingin memastikan bahwa rekomendasi hasil audit telah dilakukan. Namun demikian, jadwal audit yang baru dilakukan di akhir tahun menyebabkan singkatnya waktu tindak lanjut dari unit kerja yang menyebabkan realisasi target di tahun 2022 meleset cukup jauh. Oleh karena itu, perlu upaya monitoring yang ketat terhadap seluruh satuan kerja yang diaudit agar menyelesaikan rekomendasi hasil audit, hal ini sebagai upaya memberi nilai tambah dari hasil audit dapat diimplementasikan oleh Satker.

IKS 1.4 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

IKS	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IKS 1.4	Persen	75	68	90,99	75	79,75	106,34	81,03	85,63	105,68

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian indikator "Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)" tidak jauh berbeda dibandingkan tahun 2021 dan meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun 2020. Perbaikan pencapaian kinerja disebabkan karena semakin kuatnya tingkat pembelajaran yang dilakukan oleh Inspektorat Wilaah I kepada satuan/unit kerja BPS. Dengan kolaborasi bersama Biro Perencanaan BPS dan komunikasi dengan Kementerian PAN-RB selaku evaluator level instansi, Inspetorat telah berhasil

membangun kesadaran implementasi SAKIP. Capaian tahun 2022 dan 2021 menunjukkan sudah banyak satuan kerja dengan kategiri nilai B (diatas 65) yakni mencapai 149 dari total 174 satuan/unit kerja. Hal ini menunjukkan semakin baiknya implementasi SAKIP pada Satker di BPS Prov/Kab/Kota. Tentu saja dengan semakin baiknya implementasi SAKIP akan mendukung capaian reformasi birokrasi bagi BPS secara umum. Selanjutnya inspektorat wajib mempertahankan level pembinaan, komunikasi, serta penyempurnaan metode evaluasi agar tingkat nilai implementasi pada kategori B tetap terjaga, dan dapat menaikkan kategori nilai pada satuan/unit kerja yang nilainya masih dibawah B.

Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

IKS 2.1 : Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I

IKS	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IKS 2.1	Persen	75	100	120	95	100	105,26	83,15	85,70	103,07

Sjak tahun 2020 indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I". Meskipun sempat mengalami perubahan redaksi, pada periode 2020 dan 2021 kedua indikator masih sama dan dapat dibandingkan karena tanggung jawab Inspektorat Wilayah I masih pada kedua sub pilar yang sama. Capaian kinerja indikator ini sejak tahun 2020 telah melebihi 100 persen. Pada tahun 2022 dilakukan penyempurnaan metode pengukuran capaian kinerja dengan melibatkan perhitungan seluruh subpilar dalam pilar pengawasan pelaksanaan RB instansi dengan melebur capaian indikator seluruh inspektorat wilayah menjadi sama. Besaran capain di tahun 2022 juga masih diatas 100 persen, sehingga secara internal pelaksanaan RB instansi pada pilar pengawasan telah berjalan baik. Untuk selanjutnya, inspektorat diharapkan tetap memantau dan mendorong pencapaian reformasi birokrasi pada pilar pengawasan menjadi lebih baik dengan memperbaharui tata kelola dan dokumentasi pelaksanaan RB.

3.3 Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah Renstra 2020-2024

Pada tahun 2022 dilakukan reviu terhadap Renstra 2020-2024 Inspektorat Wilayah I dengan melihat penyesuaian dengan Perka BPS nomor 3 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama, serta menyepurnakan dasar hitung target Renstra agar lebih logis dan realistis. Secara umum indikator kinerja yang digunakan masih sama yakni terdapat satu tujuan dan dua sasaran strategis dengan lima indikator kinerja sasaran. Target Renstra di tahun 2022 telah selaras dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2022, dengan demikian analisis pencapaian telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah di tahun 2024.

Tabel 6. Capaian Kinerja 2022 terhadap Target Renstra Inspektorat Wilayah I Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target 2024	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Sasaran : Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,30	97,06	99,22
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,52	80,30	100,27
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	79,19	98,32	80,54
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	85,63	84,48	101,36
Sasaran: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen	85,70	85,58	100,14
Rata-rata Capaian				96,31

Berdasarkan hasil analisis perbandingan pada tabel 5 diatas, secara rata-rata capaian realisasi IKS tahun 2022 terhadap target tahun 2024 sudah cukup baik mencapai 96,31 persen naik dari rata-rata capaian di tahun 2021 sebelumnya yakni 93,95 persen. Namun masih terdapat satu IKS dengan pencapaian pada tahun 2022 yang belum optimal dan perlu mendapat perhatian agar dapat tercapai pada perencanaan tahun yang akan datang yaitu

IKS tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I dengan capaian kinerja baru 80,54 persen. Hal ini menuntut strategi optimal melalui monitoring penyelesaian tindak lanjut audit inspektorat secara berkala.

Pada indikator kinerja yang terkait kegiatan audit Inspektorat Wilayah I yakni persentase Satker yang mempunyai penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA pada dasarnya telah mendekati target tahun 2024, sehingga perlu dipertahankan kinerjanya. Strategi pencapaian agar target Renstra tercapai adalah memaksimalkan tingkat pemilihan satker melalui faktor-faktor risiko, dan penjadwalan audit lebih awal menghindari potensi bentrok dengan kegiatan besar prioritas BPS.

Untuk indikator terkait penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK, target tahun 2024 nilai capaian di tahun 2022 sudah melebihi 100 persen. Namun demikian setiap tahun akan terdapat penambahan jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK untuk ditindaklanjuti, sehingga tingkat penyelesaian dapat dipertahankan sampai mencapai target Renstra tahun 2024. Upaya yang harus dilakukan adalag tetap melakukan monitoring dan koordinasi bersama antara Inspektorat Wilayah I dan Inspektorat Wilayah II sebagai koordiniator, serta satuan/unit kerja yang terkait dengan rekomendasi BPK.

Untuk indikator persentase unit kerja dengan nilai SAKIP minimal B telah mencapai target di tahun 2024. Namun adanya perubahan dasar peraturan untuk evaluasi SAKIP di tahun 2023 berpotensi menemui hambatan dalam memberikan pemahaman kepada Satker. Tim evaluasi SAKIP akan menelaah pemberlakukan peraturan baru dalam evaluasi SAKIP sehingga dapat dilakukan pendekatan atas pemahaman yang sudah baik dari Satker dengan peraturan sebelumnya sehingga tidak tercipta penurunan nilai. Disamping itu perencanaan field evaluasi dapat membantu memetakan satuan kerja yang perlu mendapat pembinaan SAKIP.

Pada indikator kinerja sasaran terkait penyelenggaran reformasi birokrasi pilar pengawasan yakni persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I, nilai capaian telah mencapai 100,14 persen, sehingga nilai target 2024 telah tercapai. Kedepan diperlukan perbaikan dalam tetap mempertahan nilai capaian tersebut, melalui pembaharuan tata kelola dan peraturan-peraturan terkait pilar pengawasan dan pelaksanaan RB instansi. Khusus untuk tanggung jawab Inspektorat Wilayah I, sosialisasi terkait penanganan benturan kepentingan menjadi target yang perlu diselesaikan di tahun mendatang.

3.4 Prestasi Tahun 2022

Selama tahun 2022, Inspektorat Wilayah I belum memperoleh penghargaan baik dari internal maupun eksternal.

3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Wilayah I didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran Keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Wilayah I telah didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Wilayah I tahun 2020-2024 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Pagu yang diberikan ke Inspektorat Wilayah I untuk menjalankan fungsinya selama tahun 2022 pada Program Dukungan Manajemen adalah sebesar Rp869.329.000,- dengan realisasi mencapai 99,12 persen atau sebesar Rp861.700.782,-.

Tabel 7. Pagu dan Realisasi Anggaran 2022 Per Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran		Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan: Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS			869.329.000	861.700.782	99,12
SS.1 Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS			628.736.000	626.938.574	99,71
IKS 1.1.	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Audit	425.285.000	423.488.151	99,58
IKS 1.2.	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Penyelesaian Tindak Lanjut pemeriksaan BPK	-	-	-
IKS 1.3.	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Audit	-	-	-
IKS 1.4.	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	203.451.000	203.450.423	99,99
SS 2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel			240.593.000	234.762.208	97,58
IKS 2.1.	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Reformasi Birokrasi Instansi Pilar Penguatan Pengawasan			
		Diklat teknis bidang pengawasan dan peningkatan kompetensi	240.593.000	234.762.208	97,58

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I pada tahun 2022, alokasi anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Audit yaitu sebesar Rp425.285.000,-. Dari anggaran yang dialokasikan pada kegiatan Audit tersebut, berhasil terserap sebesar 99,58 persen. Penyerapan anggaran yang paling optimal terdapat pada kegiatan Evaluasi, yaitu sebesar 99,99 persen atau sebesar Rp203.450.423,- dari anggaran sebesar Rp203.451.000,-.

3.6 Upaya Efisiensi Tahun 2022

Inspektorat Wilayah I telah melakukan banyak kegiatan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Sebagai bagian dari mengedepankan prinsip efektif dan efisien, Inspektorat Wilayah I terus melakukan upaya efisiensi :

1. Memaksimalkan kegiatan pemeriksaan melalui metode *desk/remote* atau memeriksa dokumen secara jarak jauh melalui teknologi yang tersedia. Hal ini dapat mengurangi penggunaan anggaran perjalanan dinas ataupun memaksimalkan waktu perjalanan dinas sehingga diperoleh *output* yang lebih banyak. Beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan secara *desk* adalah :
   a. *Desk* Audit Pengelolaan Keuangan Negara;
   b. *Desk* Audit Pembangunan Gedung Kantor;
   c. *Desk* Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021;
   d. *Desk* Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022;
   e. *Desk* Evaluasi Zona Integritas Satker menuju WBK/WBBM;
2. Tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I dapat disajikan melalui data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dihitung dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Berdasarkan metode perhitungan tersebut, maka kinerja pencapaian sasaran Inspektorat Wilayah I terhadap penggunaan sumber daya dapat dikategorikan telah efisien. Hal tersebut tercermin dari tingkat efisiensi sasaran strategis kedua “Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel” adalah sebesar 5,33 persen untuk mencapai kinerja sasaran sebesar 103,07 persen. Perhitungan efisiensi disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Pagu TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 1. Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	98,15	869.329.000	861.700.782	99,12	-0,99
SS 1.1 Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	96,92	628.736.000	626.938.574	99,71	-2,88
SS 1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	103,07	240.593.000	234.762.208	97,58	5,33

3. Efisiensi lainnya yang dilakukan Inspektorat Wilayah I dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:
   a. Penggunaan media online dalam pelaksanaan rapat, diklat, sosialisasi.
   b. Menghemat penggunaan listrik dengan memaksimalkan penggunan laptop daripada PC;
   c. Tidak lagi melakukan aktivitas di kantor diluar jam kerja sehingga menghemat penggunaan listrik dan AC;
   d. Memaksimalkan penggunaan aplikasi pendukung surat/memorandum penugasan sehingga menghemat penggunaan alat tulis kantor;

3.7 Kegiatan Prioritas Inspektorat Wilayah I Tahun 2022

Pada tahun 2022 Inspektorat Wilayah I melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok serta tugas prioritas dalam rangka mendukung pencapaian kinerja baik instansi BPS maupun kinerja yang khusus dibebankan kepada Inspektorat Wilayah I. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah :

a. Pendampingan pembangunan gedung kantor;

   Pada tahun 2022 ini , Inspektorat Wilayah I sebagai koordinator Inspektorat Wilayah lainnya telah mekakukan upaya pendampingan untuk satuan kerja yang akan melakukan belanja modal pembangunan gedung kantor dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini disebabkan waktu pengadaan sudah menjelang akhir tahun (semester II) sehingga potensi keterlambatan ataupun kegagalan penyelesaian pembangunan cukup besar. Melalui kegiatan pendampingan diharapkan dapat mendeteksi risiko yang muncul dan dapat ditangani segera.

b. Penyusunan pedoman audit kinerja sensus/survei;

Inspektorat Wilayah I juga menjadi bagian dalam program arah perubahan BPS terbaru yang digagas oleh Kepala BPS untuk dapat meningkatkan peran melalui kegiatan audit kinerja. Di tahun 2022 upaya yang dilakukan adalah dengan penyusunan pedoman audit kinerja sensus.survei yang juga melalui proses pembahasan tim, studi banding ke kementerian/lembaga terkait, serta sosialisasi dan workshop bersama satuan/unit kerja BPS lainnya.

c. Probity audit kinerja Survei Biaya Hidup (SBH) 2022;

Probity audit kinerja adalah upaya melakukan audit for management, yakni melakukan audit sekaligus pada saat manajemen atau unit kerja pelaksana kegiatan teknis sensus/survei melakukan tahapan-tahapan kegiatannya. Probity audit dimaksudkan memberi rekomendasi perbaikan agar kegiatan survei dalam hal ini adalah SBH dapat berjalan efektif mencapai tujuan yang ditetapkan, dan tetap memperhatikan sisi efisiensi penggunaan sumber daya. Rekomendasi hasil probity audit inspektorat diharapkan langsung diterapkan oleh unit kerja, dan dapat berdampak pada capaian kinerja bidang teknis yang membantu kinerja BPS secara keseluruhan. Selanjutnya pada tahun mendatang SBH juga akan menjadi obyek audit kinerja secara keseluruhan hal ini untuk menjaga kesinambungan dan memberi penjaminan lebih baik. Kegiatan ini dilakukan pada dua Satker sampel di BPS daerah Jawa Barat.

d. Pendampingan administrasi kegiatan pendataan awal Regsosek 2022;

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di bulan Oktober sampai November 2022, BPS diberi amanat oleh Presiden untuk melaksanakan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Dengan sumber daya yang cukup besar, Inspektorat berkolaborasi dengan tim dari Sekretariat Utama BPS melakukan pendampingan administrasi. Kegiatan ditujukan agar Satker BPS Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi dengan tepat dan sesuai ketentuan. Hal ini sejalan dengan tugas Inspektorat sebagai APIP melakukan kegiatan penjaminan pengelolaan keuangan telah memadai. Kegiatan ini diselenggarkan pada lebih dari 60 Satuan Kerja di daerah.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah I tahun 2022 baru tercapai 98,15 persen. Meskipun capaian empat dari lima indikator telah melebihi 100 persen, namun rendahnya capaian kinerja pada indikator penyelesaian tindak lanjut hasil audit Inspektorat Wilayah I menyebabkan tingkat capaian secara keseluruhan menjadi lebih rendah. Penurunan capaian di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020, juga harus menjadi perhatian serius. Perlu upaya-upaya dan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja yang harus dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I, terutama pada pencapaian indikator penyelesaian tindak lanjut hasil audit Inspektorat Wilayah I dmana monitoring secara berkala atas temuan audit menjadi solusi atas keterlambatan dan rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut dari satuan kerja. Kesulitan anggaran dan permasalahan jadwal yang terbentur kegiatan prioritas perlu disikapi dengan perencanaan kegiatan yang lebih matang. Untuk capaian kinerja pada indikator lain, juga harus dipertahankan sejalan dengan target jangka menengah.

4.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang antara lain adalah :

1. Penyusunan rencana audit dengan memperhatikan jadwal pelaksanakan agar tidak berbenturan dengan kegiatan prioritas serta menghindari pelaksanakan di akhir tahun;
2. Melakukan monitoring secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Wilayah I agar penyelesaian dapat dilakukan segera, dan menghindari pelaksanaan tindak lanjut di akhir tahun;
3. Mengintensifkan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK;
4. Tetap melakukan pembinaan SAKIP sejalan dengan evaluasi yang akan dilakukan berdasarkan peraturan terbaru agar satuan/unit kerja lebih memahami alur implementasi SAKIP sehingga tidak menurunkan kategori nilai SAKIP;
5. Melakukan sosialisasi pada sub pilar pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan agar dapat terimplementasi dengan baik, dan mendorong percepatan penerapan peraturan badan terkait penguatan pengawasan utamanya pada pengendalian gratifikasi;

LAMPIRAN

Lampiran 1

Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPS

(Sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik)

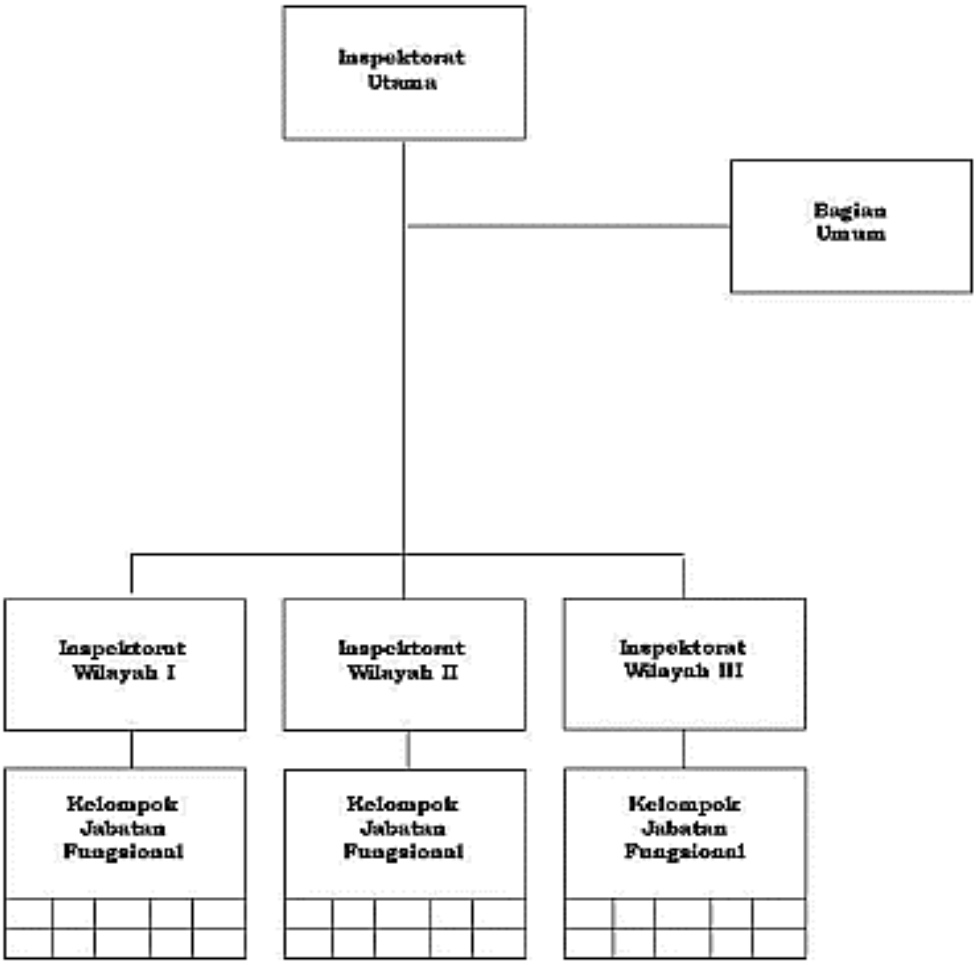

Lampiran 2

Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Wilayah I
Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra Semula					Target Renstra Reviu				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS **Sasaran Strategis (SS1) : Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS**										
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	95	96	97	100	100	95	96	96,30	96,67	97,06
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI	75	75	85	90	95	75	80	80,11	80,18	80,30
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	95	94	95	100	100	95	95	97,18	97,62	98,32
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	75	80	85	90	95	75	80	81,03	82,76	84,48
Sasaran Strategis (SS2) : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel										
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	75	95	83	87	90	75	95	83,15	84,36	85,58

Lampiran 3

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT WILAYAH I
BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Faizal Anwar M.T
Jabatan : Inspektur Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
Jabatan : Inspektur Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 19 Januari 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.	Ir. Faizal Anwar M.T
NIP. 19630621 198601 1 001	NIP. 19650319 198802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT WILAYAH I

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS			
Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,30
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	97,18
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Persen	81,03
Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I (%)	Persen	83,15

Lampiran 4

Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2021 per Triwulan

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	TW I	11,1	11,1	100
			TW II	14,8	14,8	100
			TW III	29,6	29,6	100
			TW IV	96,3	96,3	100
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0
			TW III	801,	80,52	100,51
			TW IV	80,1	80,52	100,51
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	TW I	16,6	12,7	76,61
			TW II	26,4	16,6	62,66
			TW III	26,4	16,6	62,66
			TW IV	97,2	79,19	81,48
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0
			TW III	0	0	0
			TW IV	81,03	85,63	105,68
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0
			TW III	0	0	0
			TW IV	83,15	85,7	103,07
			TW IV	83,15	85,7	103,07

Lampiran 5

Daftar Satuan Kerja Inspektorat Wilayah I Yang Diaudit Tahun 2022

No	Nama Satuan Kerja/Unit Kerja Objek Audit	Persentase Temuan Kerugian Negara Terhadap DIPA
1	BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00%
2	BPS KABUPATEN OGAN ILIR	0,00%
3	BPS KOTA PRABUMULIH - 1	0,00%
4	BPS PROVINSI PAPUA	0,19%
5	BPS KABUPATEN TULUNGAGUNG	0,01%
6	BPS KOTA PRABUMULIH - 2	0,05%
7	BPS KABUPATEN KOLAKA UTARA	0,31%
8	BPS KOTA KENDARI	0,00%
9	BPS KABUPATEN KONAWE SELATAN	0,00%
10	BPS KABUPATEN KAIMANA	0,00%
11	BPS KABUPATEN TOLIKARA	0,00%
12	BPS KABUPATEN YAHUKIMO	0,00%
13	BPS KABUPATEN JAYAWIJAYA	0,00%
14	BPS KABUPATEN PUNCAK	0,02%
15	BPS KABUPATEN MUNA *	-
16	BPS KABUPATEN WAROPEN	0,01%
17	BPS KABUPATEN MAMASA	0,02%
18	BPS KABUPATEN POLEWALI MANDAR	0,00%
19	BPS KABUPATEN MAMUJU	0,00%
20	BPS PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00%
21	BPS KABUPATEN TAPIN	0,00%
22	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	0,00%
23	POLITEKNIK STATISTIKA STIS	0,00%
24	BPS KOTA SORONG	0,00%
25	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	0,05%
26	BPS KABUPATEN BARITO KUALA	0,00%
27	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	0,01%

Lampiran 6

Daftar Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Audit Tahun 2022

No	Nama Satuan Kerja/Unit Kerja Objek Audit	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut
1	BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN	100,00%
2	BPS KABUPATEN OGAN ILIR	100,00%
3	BPS KOTA PRABUMULIH - 1	100,00%
4	BPS PROVINSI PAPUA	100,00%
5	BPS KABUPATEN JAYAWIJAYA	44,44%
6	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	100,00%
7	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	100,00%
8	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	100,00%
9	BPS KABUPATEN POLEWALI MANDAR	100,00%
10	BPS KABUPATEN MAMASA	100,00%
11	BPS KABUPATEN KONAWE SELATAN	100,00%
12	BPS KABUPATEN KAIMANA	100,00%
13	BPS KABUPATEN KOLAKA UTARA	100,00%
14	BPS KOTA KENDARI	100,00%
15	BPS KABUPATEN MUNA *	0,00%
16	BPS KOTA PRABUMULIH - 2	100,00%
17	BPS KABUPATEN TULUNGAGUNG	85,71%
18	POLITEKNIK STATISTIKA STIS	70,00%
19	BPS PROVINSI SULAWESI BARAT	69,23%
20	BPS KABUPATEN MAMUJU	90,91%
21	BPS KABUPATEN BARITO KUALA	38,46%
22	BPS KABUPATEN TAPIN	100,00%
23	BPS KOTA SORONG	61,54%
24	BPS KABUPATEN YAHUKIMO	0,00%
25	BPS KABUPATEN WAROPEN	46,15%
26	BPS KABUPATEN TOLIKARA	100,00%
27	BPS KABUPATEN PUNCAK	0,00%

Lampiran 7

Daftar Satker BPS Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat Wilayah 1
Dengan Nilai SAKIP "B"

No	Satuan Kerja	Nilai 2022	Predikat 2022
1	BPS Provinsi Sumatera Barat	75,75	BB
2	BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai	64,83	B
3	BPS Kabupaten Solok	67,30	B
4	BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	70,93	BB
5	BPS Kabupaten Tanah Datar	68,57	B
6	BPS Kabupaten Padang Pariaman	65,93	B
7	BPS Kabupaten Agam	72,13	BB
8	BPS Kabupaten Lima Puluh Koto	69,53	B
9	BPS Kabupaten Pasaman	69,36	B
10	BPS Kabupaten Solok Selatan	66,87	B
11	BPS Kabupaten Dharmasraya	69,85	B
12	BPS Kabupaten Pasaman Barat	68,55	B
13	BPS Kota Padang	67,70	B
14	BPS Kota Solok	69,04	B
15	BPS Kota Sawahlunto	69,81	B
16	BPS Kota Padang Panjang	68,61	B
17	BPS Kota Bukittinggi	72,63	BB
18	BPS Kota Payakumbuh	70,19	BB
19	BPS Kota Pariaman	62,72	B
20	BPS Provinsi Sumatera Selatan	76,81	BB
21	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	69,87	B
22	BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir	73,44	BB
23	BPS Kabupaten Muara Enim	72,61	BB
24	BPS Kabupaten Lahat	68,58	B
25	BPS Kabupaten Musi Rawas	68,38	B
26	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	72,60	BB
27	BPS Kabupaten Banyuasin	70,93	BB
28	BPS Kabupaten OKU Selatan	69,39	B
29	BPS Kabupaten OKU Timur	70,59	BB
30	BPS Kabupaten Ogan Ilir	67,22	B
31	BPS Kabupaten Empat Lawang	71,36	BB
32	BPS Kota Palembang	69,96	B
33	BPS Kota Prabumulih	69,37	B
34	BPS Kota Pagar Alam	66,82	B
35	BPS Kota Lubuk Linggau	72,29	BB
36	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76,27	BB
37	BPS Kabupaten Bangka	65,91	B
38	BPS Kabupaten Belitung	66,01	B
39	BPS Kabupaten Bangka Barat	68,92	B
40	BPS Kabupaten Bangka Tengah	70,00	B
41	BPS Kabupaten Bangka Selatan	65,93	B

No	Satuan Kerja	Nilai 2022	Predikat 2022
42	BPS Kabupaten Belitung Timur	69,49	B
43	BPS Kota Pangkal Pinang	67,62	B
44	BPS Provinsi Kepulauan Riau	76,31	BB
45	BPS Kabupaten Karimun	68,58	B
46	BPS Kabupaten Bintan	66,74	B
47	BPS Kabupaten Natuna	68,98	B
48	BPS Kabupaten Lingga	68,02	B
49	BPS Kabupaten Kepulauan Anambas	71,13	BB
50	BPS Kota Batam	69,30	B
51	BPS Kota Tanjung Pinang	71,89	BB
52	BPS Provinsi D.I. Yogyakarta	74,04	BB
53	BPS Kabupaten Kulon Progo	74,29	BB
54	BPS Kabupaten Bantul	70,61	BB
55	BPS Kabupaten Gunung Kidul	69,96	B
56	BPS Kabupaten Sleman	67,95	B
57	BPS Kota Yogyakarta	69,73	B
58	BPS Provinsi Jawa Timur	76,05	BB
59	BPS Kabupaten Pacitan	70,97	BB
60	BPS Kabupaten Ponorogo	71,84	BB
61	BPS Kabupaten Trenggalek	67,29	B
62	BPS Kabupaten Tulungagung	69,95	B
63	BPS Kabupaten Blitar	70,46	BB
64	BPS Kabupaten Kediri	70,70	BB
65	BPS Kabupaten Malang	72,60	BB
66	BPS Kabupaten Lumajang	63,66	B
67	BPS Kabupaten Jember	70,52	BB
68	BPS Kabupaten Banyuwangi	72,34	BB
69	BPS Kabupaten Bondowoso	69,93	B
70	BPS Kabupaten Situbondo	67,34	B
71	BPS Kabupaten Probolinggo	69,24	B
72	BPS Kabupaten Pasuruan	68,96	B
73	BPS Kabupaten Sidoarjo	69,62	B
74	BPS Kabupaten Mojokerto	75,74	BB
75	BPS Kabupaten Jombang	71,77	BB
76	BPS Kabupaten Nganjuk	67,06	B
77	BPS Kabupaten Madiun	66,33	B
78	BPS Kabupaten Magetan	68,02	B
79	BPS Kabupaten Ngawi	65,13	B
80	BPS Kabupaten Bojonegoro	70,75	BB
81	BPS Kabupaten Tuban	66,56	B
82	BPS Kabupaten Lamongan	68,89	B
83	BPS Kabupaten Gresik	69,06	B
84	BPS Kabupaten Bangkalan	69,42	B
85	BPS Kabupaten Sampang	68,32	B
86	BPS Kabupaten Pamekasan	72,01	BB

No	Satuan Kerja	Nilai 2022	Predikat 2022
87	BPS Kabupaten Sumenep	65,00	B
88	BPS Kota Kediri	72,14	BB
89	BPS Kota Blitar	75,53	BB
90	BPS Kota Malang	70,71	BB
91	BPS Kota Probolinggo	71,30	BB
92	BPS Kota Pasuruan	70,52	BB
93	BPS Kota Mojokerto	68,82	B
94	BPS Kota Madiun	75,73	BB
95	BPS Kota Surabaya	70,05	BB
96	BPS Kota Batu	67,44	B
97	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	76,31	BB
98	BPS Kabupaten Tanah Laut	69,59	B
99	BPS Kabupaten Kota Baru	70,57	BB
100	BPS Kabupaten Banjar	70,68	BB
101	BPS Kabupaten Barito Kuala	67,71	B
102	BPS Kabupaten Tapin	72,47	BB
103	BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	71,10	BB
104	BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah	69,89	B
105	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	71,16	BB
106	BPS Kabupaten Tabalong	65,31	B
107	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	71,07	BB
108	BPS Kabupaten Balangan	70,59	BB
109	BPS Kota Banjarmasin	72,15	BB
110	BPS Kota Banjar Baru	67,40	B
111	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	76,57	BB
112	BPS Kabupaten Buton	67,67	B
113	BPS Kabupaten Muna	66,44	B
114	BPS Kabupaten Konawe	75,51	BB
115	BPS Kabupaten Kolaka	69,91	B
116	BPS Kabupaten Konawe Selatan	69,99	B
117	BPS Kabupaten Bombana	67,02	B
118	BPS Kabupaten Wakatobi	68,60	B
119	BPS Kabupaten Kolaka Utara	71,19	BB
120	BPS Kabupaten Buton Utara	69,07	B
121	BPS Kabupaten Konawe Utara	71,68	BB
122	BPS Kabupaten Kolaka Timur	67,25	B
123	BPS Kota Kendari	75,40	BB
124	BPS Kota Baubau	72,14	BB
125	BPS Provinsi Sulawesi Barat	76,24	BB
126	BPS Kabupaten Majene	65,22	B
127	BPS Kabupaten Polewali Mandar	73,90	BB
128	BPS Kabupaten Mamasa	66,02	B
129	BPS Kabupaten Mamuju	67,32	B
130	BPS Kabupaten Mamuju Utara (Pasang Kayu)	71,27	BB
131	BPS Provinsi Papua Barat	75,90	BB

No	Satuan Kerja	Nilai 2022	Predikat 2022
132	BPS Kabupaten Fakfak	65,28	B
133	BPS Kabupaten Kaimana	69,87	B
134	BPS Kabupaten Teluk Wondama	63,66	B
135	BPS Kabupaten Teluk Bintuni	65,49	B
136	BPS Kabupaten Manokwari	67,89	B
137	BPS Kabupaten Sorong Selatan	60,11	B
138	BPS Kabupaten Sorong	66,39	B
139	BPS Kabupaten Raja Ampat	64,83	B
140	BPS Kota Sorong	71,67	BB
141	BPS Provinsi Papua	73,01	BB
142	BPS Kabupaten Merauke	62,14	B
143	BPS Kabupaten Biak Numfor	65,14	B
144	BPS Kabupaten Boven Digoel	65,48	B
145	BPS Kabupaten Mappi	65,89	B
146	BPS Kabupaten Asmat	60,86	B
147	BPS Kabupaten Keerom	63,11	B
148	BPS Kabupaten Puncak	60,65	B
149	BPS Kota Jayapura	65,84	B

Lampiran 8

Daftar Diklat dan Seritifikasi Inspektorat Wilayah I Tahun 2022

No	Nama Pegawai	Nama Diklat / Sertifikasi
1	Fuad Ramdhan Dewantoro	Penyusunan Kertas Kerja Audit
2	Nuraida Ruly Ma'rifanti	Penyusunan Kertas Kerja Audit
3	Vocalyn Khaleda Muliantari	Penyusunan Kertas Kerja Audit
4	Murniyati	Reviu Laporan Keuangan
5	Michael Andre	Reviu Laporan Keuangan
6	Zakia Fadla	Reviu Laporan Keuangan
7	Afif Rezky Edmidio	Reviu Laporan Keuangan
8	Arjuna Prasetia Larosa	Reviu Laporan Keuangan
9	Khalila Shahab	Evaluasi atas Implementasi SAKIP
10	Bimo Aji Dimas Danindro	Evaluasi atas Implementasi SAKIP
11	Inandha Puri	Evaluasi atas Implementasi SAKIP
12	Khalila Shahab	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
13	Dina Syafira	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
14	Novrizal	Analisis Pemecahan Masalah di lingkungan APIP
15	Arwan Nugroho	Analisis Pemecahan Masalah di lingkungan APIP
16	Arwan Nugroho	Manajemen Risiko
17	Murniyati	Manajemen Risiko
18	Yogi Hendrawan	Manajemen Risiko
19	Heru Tranggono	Peran Konsultansi bagi Auditor Internal di lingkungan APIP
20	Andi Pujiono	Peran Konsultansi bagi Auditor Internal di lingkungan APIP
21	Afifati Ulya	Penulisan Laporan Hasil Audit Intern di lingkungan APIP
22	Arjuna Prasetia Larosa	Big Data Analyst
23	Galih Rosanti Capriana Chandra	Audit Tingkat Dasar di lingkungan APIP
24	S. Maruli T. Pane	Teknik Audit Berbantuan Komputer di lingkungan APIP
25	Faizal Anwar	Manajemen Pengawasan di lingkungan APIP
26	Sita Sih Adistuti	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan di lingkungan APIP
27	Mohamad Apip	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko di lingkungan APIP
28	Sulistiyowati	Manajemen Barang Milik Negara di lingkungan APIP
29	Haris Sukendar, Se	Manajemen Barang Milik Negara di lingkungan APIP
30	Yogi Hendrawan	Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa
31	Aditya Yunianto	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik di lingkungan APIP
32	Haryanto	Teknik Audit Berbantuan Komputer di lingkungan APIP
33	Hermano Adi	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan di lingkungan APIP
34	Arwan Nugroho, Se	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)
35	Sulistiyowati	Sertifikasi Teknologi Informasi
36	S Maruli T Pane	Sertifikasi Teknologi Informasi
37	Novrizal	Sertifikasi Teknologi Informasi

BADAN PUSAT STATISTIK

Penyedia
Data Statistik
Berkualitas
untuk
Indonesia
Maju

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa